



Kedaulatan Rakyat (Hal.2/HLD)

Senin, 19 Mei 2025

MESKI SUDAH DIANGGARKAN DI APBD Bupati Kulonprogo Menolak Mobil Dinas Baru

KULONPROGO (KR) - Bupati Kulonprogo Dr Agung Setyawan menegaskan, pemerintah kabupaten (pemab) setempat bertekad menciptakan inklusi sosial, kesetaraan dan pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), M Joni Yulianto dan jajarannya di ruang kerja bupati, Jumat (16/5).

Bupati Agung Setyawan menjamin pemkab akan selalu berupaya memberikan ruang dan akses bagi difabel untuk mendapatkan hak-haknya sama seperti masyarakat lainnya. Pemkab akan selalu membuka ruang diskusi dan partisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun dalam perencanaan pembangunan yang ramah difabel. "Sehingga saya harapkan dari tahap perencanaan awal dari lingkup paling dekat kalurahan, kapanewon dan kabupaten, harus dilibatkan. Akses ini jangan semata-mata dimaknai sebagai hanya akses fisik infrastruktur, lebih dari itu dimaknai sebagai akses non fisik," jelasnya.

Agung juga menegaskan, dirinya menolak dibelikan mobil dinas baru, meskipun sudah dianggarkan di APBD. "Saya memutuskan, anggaran mobil dinas tersebut dialihkan untuk membiayai pelayanan publik dan infrastruktur yang mendesak diselesaikan," tegas Agung.

Sementara itu Joni didampingi Project Officer Nasional, Kuni Fatonah dan tim, menjelaskan, SIGAB organisasi nonpemerintah bersifat independen, nirlaba dan non-partisan.

Kegiatan SIGAB dengan Kabupaten Kulonprogo diawali dengan program

Rintis Desa Inklusi yang ditandai dengan MoU pada 12 April 2016. Desa dampingan awal ada enam Kalurahan di Kapanewon Lendah kemudian bertambah tujuh Kapanewon yaitu Kokap, Nanggulan, Wates, Galur, Temon, Pengasih dan Kalibawang. Program tersebut bertujuan menciptakan inklusi sosial dan pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas atau difabel, ditandai dengan meningkatnya akses difabel terhadap layanan publik, seperti kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum.

Joni mengharapkan kerjasama dengan pemda, sehingga meningkatkan partisipasi dan juga akses terhadap difabel untuk memperoleh layanan publik, serta meningkatnya partisipasi difabel dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.

Terdapat dua faktor utama terwujudnya kelurahan inklusif adalah partisipasi dan akses. Disabilitas harapannya dapat ikut berpartisipasi dalam ranah pembangunan mulai dari pengambilan kebijakan hingga ikut serta dalam proses pembangunan. Selanjutnya disabilitas harus mendapat akses dari hasil pembangunan itu sendiri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo, Aris Nugroho saat dikonfirmasi Minggu (18/5) membenarkan hal itu. "Anggaran pengadaan mobil dinas bupati dialihkan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan," ungkap pejabat yang hobi bersepeda tersebut.

"Keputusannya dalam rapat tiru anggaran daerah dipimpin Pak Bupati langsung pada Jumat (16/5) pagi," ujar Aris.

(Rul)

MESKI SUDAH DIANGGARKAN DI APBD Bupati Kulonprogo Menolak Mobil Dinas Baru



KR-Asrul Sani
Bupati Kulonprogo Dr R Agung Setyawan (kiri) dan Direktur SIGAB, M Joni Yulianto bertemu di Ruang Kerja Bupati setempat.